

KEPENDIDIKAN NU DAN PENDIDIKAN KE-NU-AN (Studi Kasus Tata Kelola Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat)

Nuruddin*
Jumarim**
Akhmad Asyari***

Abstract: Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat peran dan tata kelola Lembaga Ma'arif NU NTB sebagai landing sektor yang secara khusus membidangi tentang pendidikan di kalangan NU. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka (*library research*), dan studi kasus (*case study*), dengan pendekatan kualitatif, pengambilan kesimpulan pola tehnik induktif-deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap warga NU yang senantiasa memiliki giroh untuk mengabdikan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan, peran, fungsi dan tugas LP Ma'arif NU NTB dalam mengelola 528 Satuan Pendidikan tidak bisa maksimal, melainkan sebatas memberikan motivasi pengembangan kualitas kelembagaan dan proses pembelajaran, mengkoordinasikan program-program pemerintah dan donor dan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif NU.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama (NU), Pendidikan, LP Ma'arif

Pendahuluan

Sejarah membuktikan bahwa setiap generasi dalam kehidupan manusia memiliki peradaban tersendiri sekalipun bersifat menemukan, mempertahankan, melanjutkan dan atau mengembangkan peradaban yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya bahkan menjadikannya sebagai loncatan penemuan

* Universitas Islam Negeri Mataram, email: nuruddinmh@uinmataram.ac.id

**Universitas Islam Negeri Mataram, email: jumarim@uinmataram.ac.id

***Universitas Islam Negeri Mataram, email: akhmadasyari@uinmataram.ac.id



teknologi terbaru dan tercanggih. Dalam siklus demikian, tak disangkal bahwa pendidikan memegang sumbu rantai vital dalam sistem kehidupan. Bagi manusia, pendidikan adalah sesuatu yang esensial. Melalui pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam semesta ini demi mempertahankan kehidupannya. Urgensinya sebagai media pembentukan keperibadian seseorang yang mengapresiasi dan memaknai kehidupan bagi sesamanya. Keperibadian yang apresiatif terhadap kehidupan akan mendorong semangat untuk memproduksi, berkreasi, berinovasi dan berprestasi. Atau meminjam istilahnya *Poule Freire*, pendidikan semestinya menjadi media memanusiakan manusia (*humanisasi*), bukan justru memperbudak manusia (*dehumanisasi*). Dalam konsep Islam, pendidikan menjadi media melindungi, mengasah dan mengoftimalkan fitrah manusia, yaitu memakmurkan alam dengan peradaban dan kebudayaan. Karena pentingnya arti pendidikan, maka diposisikan sebagai agenda strategis dan karenanya, kaum terdidik diberikan kedudukan yang tinggi (QS.58:11) sepanjang sejarah sosial umat Islam, sehingga dapat mewarnai corak peradaban dunia.

Maka, sangat logis jika kemudian umat Islam mengembangkan berbagai bentuk pendidikan yang berlangsung dari abad ke abad dalam sistem kelembagaan yang kokoh dan terus menerus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indoensia, peran dan perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak bisa disepelekan, apalagi untuk dikatakan tidak memiliki peran sama sekali. Peran lembaga pendidikan Islam di Indoensia tercatat semenjak masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga masa reformasi, baik dalam (1) aspek pendidikan (pedagogis), yaitu perannya dalam peningkatan SDM yang berkualitas sehingga melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang memiliki wawasan ke-Islam-an dan nasionalisme yang tinggi. (2) aspek moral-spiritual, yaitu membina peserta didik menjadi hamba yang suka beribadah melalui penguatan dan dasar pemahaman keagamaan secara baik meliputi internalisasi nilai-nilai kejujuran, kerendahan hati, kesederhanaan, kemanusiaan, toleransi, kebersamaan, kesetiakawanan dan sebagainya sehingga muncul kepemimpinan

(formal dan informal) yang kharimistik dan demokratis secara sosiologis-politis dan rendah diri (*tawadhu'*) di mata Tuhan-Nya, dan (3) aspek sosio-kultural, yaitu berperan membentuk karakter masyarakat/bangsa. Peran pendidikan Islam yang demikian strategis bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia bisa terwujud atas peran dan eksistensi lembaga atau Organisasi Sosial Keagamaan (ORMAS) Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Al-Washliyyah, Nahdlatul Wathon dan sebagainya.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang diprakarsai pendiriannya oleh para pimpinan pondok pesantren (ulama) yang dihajatkan sebagai usaha mewadahi kegiatan-kegiatan ulama dan umat Islam Indonesia yang berfaham *Ablussunah wal jama'ah* (aswaja) untuk melanjutkan dakwah Islamiyah serta melaksanakan *amar ma'ruf nabi munkar*. Sebagai misi utamanya, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi ini terus berkembang secara-dinamis meliputi 4 orde dengan sikap; kebijakan dan komitmentnya yang berbeda-beda terhadap Ormas Islam, khususnya NU, yakni masa penjajahan, masa kemerdekaan dan orde lama, orde baru dan orde reformasi. Namun, NU tetap bisa eksis dan mempersembahkan karyanya bagi agama, bangsa dan Negara. Termasuk estapet dalam mempertahankan nilai dan prinsip-prinsip dasarnya sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* beraqidah/berasaskan Islam dengan menganut faham *Ablussunnah wal Jamaah* dan menurut salah satu dari madzhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan socal bagi seluruh rakyat Indonesia (PBNU: 2011)

NU juga tetap konsisten mempertahankan tujuan dan usaha-usaha pokok –sebagaimana diwariskan oleh para *masyayechke*/pendiri NU dengan memodifikasi hal-hal *furu'* sesuai kebutuhan dan

perkembangan zaman. Yakni berlakunya ajaran Islam yang menganut *faham Ahlussunnah wal Jamaah* dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sedangkan usaha-usahanya dalam mencapai tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut (a) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menurut salah satu madzhab Empat dengan melaksanakan *dakwah Islamiyah* dan *amr ma'ruf nahi munkar* (b) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara (c) Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan dan (d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*. (PBNU: 2011)

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita dan usaha NU di bidang pendidikan. LP Ma'arif NU dalam perjalanannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi –baik sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional RI maupun madrasah yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI-yang jumlahnya tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan bernaung di bawahnya satuan-satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi dari tingkat akademi hingga universitas(Muktamar PBNU: 2010)

Apakah kebijakan “plangnisasi NU” atau “NU-nisasi Plang” lembaga pendidikan yang ada di NTB juga menjadi bagian dari dinamika “politik pendidikan” yang ada. Dimana lembaga pendidikan menjadi membutuhkan NU sebagai identitas besarnya atau sebaliknya NU membutuhkan identitasnya menempel dimana-mana sebagai bentuk kebesarannya? Jawabannya bisa jadi “ya” dan bisa jadi “tidak”. Yang pasti, jumlah lembaga dan satuan pendidikan yang setia menaungkan dirinya pada LP Ma’arif NU NTB cukup signifikan, padahal NU sudah tidak menjadi Partai Politik atau kader NU tidak sedang memegang jabatan politik tertinggi di NTB. Lebih spesifik lagi, Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram semenjak terbentuk dan berdirinya pada tahun 1973 tetap konsisten menunjukkan identitas ke-NU-an atau ke-Ma’arif-annya hingga sekarang, sekalipun kualitas satuan pendidikan yang dikelolanya “belum” berkembang atau jauh tertinggal oleh lembaga pendidikan lainnya, terutama di kalangan sesama pendidikan ma’arifnya.

Untuk mendapatkan jawaban atau gambaran tentang hal ini, maka penelitian memotret sistem pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama NTB dengan mengambil eksistensi dua institusi yang sama sama menggunakan label atau simbol NU, tetapi dalam kebijakan PP LP Ma’arif NU antara keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling menguatkan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma’arif NU NTB sebagai perangkat kerja NU NTB bidang pendidikan dan Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram sebagai penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan yang berafiliasi dengan pendidikan Ma’arif NU. Dan kedua lembaga ini berkantor di dalam satu kompleks lahan yang terletak di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram

Kajian Literatur

Prinsip dan Nilai Yang Diperjuangkan NU

Jauh sebelum Nahdlatul Ulama --yang bermakna kebangkitan ulama-- dibentuk menjadi organisasi atau *jam’iyah* terlebih dahulu telah ada dalam wujud *jama’ah* atau komunitas yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik

tersendiri. Choirul Anam mengilustrasikan kondisi pra berdirinya NU sebagai *Jam'iyah* dengan tiga tahapan; *Pertama*, bahwa kebangkitan ulama sudah ada dan berlangsung sejak lama dalam bentuk kegiatan keagamaan yang melembaga menjadi pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren pada saat itu meniscayakan kehadiran sosok kiai yang memiliki sifat mulia, *'alim* dan *karamah* dan karenanya bisa menjadi pemimpin kharismatik di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya. *Kedua*, bahwa diantara kiai-kiai pesantren terjalin hubungan sedemikian erat karena adanya kesamaan sumber ilmu, baik guru maupun daerah tempat belajar bahkan dipertahankannya melalui silaturahmi dan perkawinan antar generasi sehingga menjadi jalinan keluarga besar. *Ketiga*, bahwa dari tradisi hubungan antar kiai itu, secara kultural tumbuh tradisi keilmuan bagi para santri dengan berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain, dan akhirnya menjadi pelopor tumbuhnya sejumlah pesantren baru dibanyak daerah. (Choirul Anam: 2010, 16)

Para kiai yang menjadi pemimpin pondok pesantren inilah yang memprakarsai pembentukan NU sebagai *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan pada tanggal 16 Radjab 1344 H di Surabaya. Ada beberapa faktor yang menjadi motif dibentuk Nahdlatul Ulama, yaitu seputar fakta dan fenomena saat itu antara lain, motif agama, pendidikan dan nasionalisme untuk kemerdekaan. Motif agama jelas untuk mempertahankan agama Islam dari agenda kristenisasi melalui kebijakan diskriminasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Choirul Anam: 2010, 26) dan juga mempertahankan ajaran Islam yang berfaham *Ablussunah wal Jama'ah* (tradisi bermazhab) dari gerakan pembaharuan (modernis) Islam. Hal ini tampak sekali ketika KH. Wahab Hasbullah berpisah dengan KH. Mas Mansur dalam pengelolaan madrasah Nahdlatul Wathan Surabaya, dimana KH. Wahab Hasbullah tetap bersikukuh dengan sikap bermazhab, sementara KH. Mas Mansur anti bermazhab dan masuk menjadi tokoh Muhammadiyah. Serangan semakin kuat, maka KH. Wahab Hasbullah menginisiasi pelatihan atau kursus *masail diniyyah* guna memperkuat wawasan dan pengetahuan ulama-

ulama muda dalam berdebat mempertahankan praktek bermazhab secara khusus dan faham *Ablussunah wal Jama'ah* secara umum. (Choirul Anam: 2010, 32-33) Sedangkan motif pendidikan dan nasionalisme untuk kemerdekaan sangat jelas terlihat dari aktivitas para pendiri NU, yaitu membentuk pesantren yang sudah mulai tersebar di beberapa daerah, membentuk madrasah Nahdlatul Wathan yang cabangnya juga tersebar di beberapa di daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekaligus pembentukan kelompok kajian *taswirul afkar*, guna memperkuat wawasan, pengetahuan dan kebudayaan.

Kehadiran NU sebagai bagian dari gerakan keagamaan dan kemerdekaan RI bersama organisasi Islam lainnya, karena memiliki sistem nilai yang ingin diamalkan dan ditampilkan menjadi kekuatan "Islam Indonesia". (Abdurrahman Wahid) Setidaknya ada 4 sistem nilai yang diperjuangkan NU, yaitu;

1. Paham *Ablussunah wal Jama'ah* (ASWAJA). Pengertian ASWAJA yang diajarkan di lingkungan NU adalah "pengikut ajaran Islam yang berlandaskan pada (a) al-Qur'an (b) Sunnah Nabi Muhammad yang sudah dijalankan bersama para sahabat (c) Sunnah Para Sahabat Nabi terutama *Khulafa al-Rasyidin*; Abu Bakr, Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib. (Abdurrahman Wahid, 147)
2. Berteologi/beraqidah dengan paham al-Asy'ariyyah dan al-Maturidiyyah yang menitikberatkan keimanan pada 6 hal (a) Iman pada Allah (b) Imam pada Malaikat (c) Iman pada kitab – kitab suci (d) Iman pada Rasul Allah (e) Iman pada hari akherat/kiamat (f) iman pada qadla dan qadr. (Abdurrahman Wahid, 159)
3. Bermazhab dalam Agama. Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ablusunnah wal Jama'ah* yang dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. (Muktamar NU XXXII: 2010)

4. Bentuk kelembagaan yang berbasis Ulama. Sistem nilai yang dikembangkan NU melalui kelembagaannya adalah adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dimana legislatif dan yudikatif ada pada bidang *syuriah* yang berasal dari kalangan ulama, sedangkan eksekutifnya ada pada unsur *tanfidziah* yang berasal dari kalangan kader NU profesional. Dimana kebijakan tertinggi organisasi ada pada *syuriah*. (Choirul Anam: 2010, 186-192)

Setelah NU menyatakan dirinya kembali ke khittah 1926 melalui muktamarnya ke 27 pada tahun 1984 di Situbondo – Jawa Timur, maka prinsip dan nilai yang diperjuangkan NU menjadi semakin jelas, sebagaimana dirumuskan dalam Naskah Khittah 1926 yang dokumennya disejajarkan dengan *Muqaddimah Qanun Asasi Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama* KH. Hasyim Asy'ari. Secara ringkas Khittah 1926 menandakan tentang *Mabadi' Khaira Ummah* atau sikap kemasyarakatan NU yang bercirikan pada;

1. *Al-Tawassuth wa Al-I'tidal*. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama.
2. *Al-Tawazun*. Sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah SWT, kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.
3. *Al-Tatsamuh*. Sikap toleran dan rukun dalam mebinana kehidupan, baik intern maupun antar negara, bangsa, agama.
4. *Al-Amru Bi al-Ma'ruf wa Al-Nahyu 'an al-Munkar*. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Lebih lanjut, dengan keempat *mabadi' khaira ummat* dimaksud, maka diharapkan dapat membentuk karakter perilaku warga NU, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi. (Muktamar XXVII NU NO 02/MNU-27/1984).

Tujuan, Usaha dan Perangkat Kerja NU

Untuk menjalankan usaha-usaha dan program, NU memiliki tiga perangkat kerja organisasi, yaitu; Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom. (Muktamar NU XXXII: 2010) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Ada 14 lembaga yang dibentuk NU, yaitu; (1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, (2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU (3) Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI (4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU (5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP2NU, (6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, (7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat LAKPESDAM, (8) Lembaga Bantuan Hukum disingkat LBHNU, (9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI, (10) Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU, (11) Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, (12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, (13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, (14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU. (Muktamar NU XXXII: 2010) Sedangkan Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus yang terdiri dari tiga Lajnah; (1) Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, (2) Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTN NU (3) Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU. (Muktamar NU XXXII: 2010 Pasal 19)

Sedangkan Badan Otonom dikelompokkan dalam dua katagori (a) Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan (b) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Badan otonom kategori pertama terdiri dari; (1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU (2) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU (3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU (4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

disingkat IPNU (5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU. Sedangkan Badan otonom kategori kedua terdiri dari; (1) Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (2) Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh (3) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU (4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI (5) Pagar Nusa NU bidang pengembangan seni bela diri (6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU. (Muktamar NU XXXII: 2010, Pasal 20)

LP Ma'arif Sebagai Departemen NU Bidang Pendidikan

Tujuan, Usaha dan nilai-nilai yang harus dikembangkan dan diwujudkan Nahdlatul Ulama sebagai *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah*, sebagaimana diatur dalam Qanun Asasi, Naskah Khittah 1926, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, cukup luas, dan karenanya membutuhkan perangkat organisasi dalam bentuk Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang jumlahnya banyak sekali sekaligus ditopang dengan struktur organisasi masing-masing dari level pusat hingga level Pengurus Anak Ranting di level Dusun, bahkan struktur setingkat cabang istimewa di beberapa Negara. Oleh karena itu, NU menjadikan pendidikan sebagai basis utama bagi *problem solvingnya* yang dijalankan oleh semua perangkat organisasi atau *jam'iyah dan Jama'ah* NU baik melalui pendidikan formal, informal dan non formal yang terkelola secara sistemik, integrative, komprehensif dan holistik. Sebagai kader NU, maka akan akan mendapatkan pendidikan informal dan non formal melalui system pengkaderan pada Badan otonom NU sesuai kelompok umur dan jenis kelaminnya (IPNU, IPPNU, GP Ansor, Fatayat NU dan Muslimat NU). Sebagai jama'ah NU, maka akan mendapatkan pendidikan in formal dan on formal melalui program pembinaan, pengajaran, pengayoman dan pemberdayaan oleh semua lembaga, lajnah dan badan otonom sesuai profesi, hoby, usia dan jenis kelaminnya.

Namun, khusus menyangkut pelayanan bidang pendidikan formal, maka harus diatur secara tegas dan karenanya LP Ma'arif NU ditunjuk sebagai departementasi NU bidang pendidikan formal, yaitu penanggungjawab, penyelenggara dan pengelola

satuan pendidikan (formal) Ma'arif NU. Dengan posisi yang demikian strategis, LP Ma'arif NU secara terus menerus melakukan pembenahan system pendidikan (formal) Ma'arif NU dengan merumuskan kebijakan strategis terkait sistem pendidikan NU, seperti Rencana Strategis Pendidikan Ma'arif NU, Tata Kerja LP Ma'arif NU, Pola Koordinasi dan Kelembagaan Pendidikan Ma'arif NU, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU dan Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma'arif NU.

Secara historis, NU didirikan oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren guna memperluas jangkauan dan cakupan kerja pesantren atau dengan kalimat lain 'Pesantren adalah NU kecil, sedangkan NU adalah pesantren besar'. Fakta ini berlanjut, dimana pengurus NU disemua level dan perangkat organisasi memiliki kecenderungan secara pribadi untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mengelola satuan pendidikan baik formal maupun in formal, lalu diafiliasikan dengan pendidikan Ma'arif NU, bahkan warga NU yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan NU maupun perangkat organisasi yang lain, juga mempunyai semangat yang sama. Sehingga lembaga pendidikan dan satuan pendidikan yang bernaung dibawah LP Ma'arif NU menyebar di beragam daerah dengan jumlah yang signifikan serta "kwalitas" yang beragam. Atas fakta ini, maka LP Ma'arif NU merumsuakn dan menetapkan bahwa ada 2 (dua) jenis satuan pendidikan Ma'arif NU meliputi (1) Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh lembaga pendidikan Ma'arif NU secara langsung dan (2) Satuan Pendidikan yang bernaung dibawah LP Ma'arif NU dan mempunyai pengelola sendiri dengan tetap merujuk pada peraturaan-peraturan yang ditetapkan oleh LP Ma'arif NU. (PP Ma'arif NU: 2006, 15). Jenis pertama jelas dibawah kendali dan pengelolaan LP Ma'arif NU sebagai departemen NU bidang pendidikan, tetapi jenis kedua bisa jadi dilaksanakan oleh Badan Otonom NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU dan lainnya atau oleh Lembaga NU yang lain atau oleh tokoh NU, jamaah NU yang membentuk Yayasan atau Badan Hukum dan mendirikan serta mengelola satuan pendidikan formal tertentu.

Otonomi atau desentralisasi yang diberikan NU dalam bidang pendidikan kepada semua lembaga penyelenggara pendidikan yang berafiliasi dengan LP Ma'arif NU bersifat luas yang mencakup soal kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan asset, manajemen pendidikan, keuangan dan sebagainya. Kecaali dalam hal identitas ke-NU-an, maka diaturnya secara tegas seperti pengajaran Aswaja, logo atau lambang kelembagaan yang harus mengikutsertakan lambang LP Ma'arif NU baik dalam papan nama maupun kop resmi lembaga, sebagai konsekwensi afiliasinya dengan NU. (PP LP Ma'arif: 2006, 25)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah gaubungan antara studi pustaka (*library research*) dengan studi kasus (*case study*) mengingat hasil yang diinginkan bersifat luas, yaitu Konsep Kependidikan NU Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana dengan pendekatan ini, peneliti mengungkap dan merefleksikan fakta senyatanya tentang kontribusi, posisi dan peran PW LP Ma'arif NU NTB dalam menyelenggarakan, mengeloa dan membina lembaga pendidikan NU khusus terhadap Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka secara sadar peneliti memposisikan diri sebagai instrument kunci penelitian sebagaimana disyaratkan Lexy J. Moleong, yaitu berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, mengambil kesimpulan dan sekaligus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. (Lexy J. Moleong: 2002, 121) Proses pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola tehnik pemikiran induktif-deduktif, setelah secara keseluruhan data dianggap cukup dan tervalidasikan melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan moleong, yakni empat di antaranya, yaitu; Triangulasi, Kecukupan referensi, Pengecekan anggota dan Pengayaan dengan sejawat. (Lexy J. Moleong: 2002, 75).

Temuan dan Pembahasan

NU NTB; Sejarah Kehadiran & Perkembangannya

Hubungan antara NU dan pesantren atau lembaga pendidikan Islam tradisional adalah hubungan timbal-balik bahkan sulit untuk dipisahbedakan. Awal kelahiran pesantren dipelopori oleh Kiai atau Ulama secara individu-individu atau kolektif dan diantara mereka terbangun (berjejaring) berbasis kekerabatan hubungan darah, terutama di Jawa. Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat cepat dari Surabaya ke berbagai belahan daerah di Nusantara, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Melalui pergerakan sosial-ekonomi kaum pedagang dan saudagar, NU telah mendapatkan simpatisan di Daerah Lombok. Mereka mendapatkan mandat personal untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren yang ada di Lombok. Usaha para pedagang dan saudagar ini mendapatkan respon positif dari pimpinan pondok pesantren di Lombok (Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah: 2010, 37) dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi simpatisan dan juga sebagai pengurus NU. Pada tahun 1936, tepatnya 10 tahun setelah pendirian NU di Surabaya, KH. Muhammad Dahlan dari unsur Pengurus NU Surabaya datang ke Ampenan – Lombok menemui tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren yang sudah bersedia bergabung dengan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Pertemuan antara KH. M. Dahlan dengan pimpinan pondok pesantren di Lombok dilaksanakan pertama kali di gedung bioskop milik H. Abdul Kadir di Ampenan dan menghasilkan keputusan penting tentang pembentukan Konsul NU se-Daerah Lombok (periode pertama) yang berkedudukan di Ampenan. (Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah: 2010, hlm.36-38)

Pasca berdirinya Konsul NU se-Daerah Lombok di Ampenan pada tahun 1936, maka jaringan komunikasi dengan kepengurusan dan aktivis NU di berbagai daerah semakin intensif. Gerakannya terfokus pada pendidikan dan dakwah agama Islam melalui lembaga pondok pesantren dan majelis ta'lim. Namun, setelah kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945, maka NU

memasuki ranah politik dengan bergabung di Masyumi dengan tetap menjadikan NU secara kelembagaan sebagai lembaga representatifnya.

Sedangkan pengurus konsul NU se Daerah Lombok, disatu sisi tetap patut pada kebijakan NU nasional untuk bergabung dengan Masyumi, namun di sisi lain tidak menjadikan NU secara kelembagaan sebagai representasi politiknya di Masyumi, melainkan individu-individu pengurus konsul NU se daerah Lombok membentuk Persatuan Umat Islam Lombok (PUIL) bersama dengan tokoh-tokoh lain di Lombok sebagai representasi kelembagaannya di Masyumi, sedangkan NU tetap sebagai *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* (Organisasi Sosial Keagamaan) yang tidak terlibat politik praktis atau menjadi partai politik. Oleh karena itu, ketua konsul NU se Daerah Lombok, tidak secara otomatis menjadi ketua Konsul NU Sunda Kecil yang berada di Singaraja - Bali saat itu. Pada tahun 1957 menjelang pembentukan provinsi NTB (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Penatatan Kebudayaan Daerah: 1977/1978, 190), terbentuk pengurus Wilayah NU NTB dengan menetapkan TGH. Sholeh Hambali sebagai Rais Syuriah dan H. Achsyid sebagai ketua Tanfidziah PWNU NTB yang pertama secara aklamatif. (Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah: 2010, 18)

Duet kepemimpinan guru-murid, antara TGH. Moch. Sholeh Hambali dan H. Achsyid sebagai rais syuriah dan ketua tanfidziah PWNU NTB telah berhasil memantapkan eksistensi NU baik sebagai *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* maupun sebagai *Jam'iyah Diniyyah Sijasyyah* di seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat. Namun, sebagai partai politik, NU tak terhindarkan dari interik dan konflik internal sehingga duet kepemimpinan guru-murid ini berakhir pada tahun 1968 karena TGH. M. Sholeh Hambali meninggal dunia dan tak lama berselang H. Achsyid diganti posisinya menjadi ketua tanfidziah NU NTB dengan terpilihnya H. Wildan sebagai ketua tanfidziah dan H. Saleh Wakek sebagai rais syuriah melalui konferensi wilayah NU yang dipimpin langsung oleh H. Subhan ZE selaku utusan resmi PBNU dan berhasil menghantarkan NU sebagai partai politik peserta Pemilu tahun

1971. Semenjak terbentuknya PWNU NTB pada tahun 1957 hingga tahun 2020, ini artinya, estapet kepemimpinan dan juga regenerasi dalam NU terus berjalan, minimal sekali dalam 5 tahun, kecuali pada masa NU sebagai partai, sangat tergantung pada peristiwa atau interik politik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan NU mendapatkan otonomi seluas-luasnya dalam pengelolaan satuan pendidikannya dan termasuk untuk menentukan afiliasi politiknya sendiri.

Beberapa badan otonom mulai diperbaharui kepengurusannya; Muslimat NU, GP Ansor dan Fatayat NU, dan termasuk dibentuknya beberapa lembaga sebagai departementasi PW NU NTB dalam melakukan penghidmatan dalam banyak bidang; Lembaga Mabarroto diketuai oleh H. Djam'an, LP. Ma'arif diketuai oleh Ahmad Taqiuddin, LKK NU diketuai oleh L. Mustajab, LDNU diketuai oleh Mukhlasuddin dan sebagainya. Dan semenjak konferensi pertama PWNU NTB pasca reformasi, tahun 2002, sekarang, semua lembaga yang diamanatkan dalam AD/ART NU selalu dibentuk juga termasuk Badan Otonom. Bahkan, diakhir tahun 2012 dapat dibentuk badan otonom baru, yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di NTB yang diketui oleh Prof. Dr. H. L. Husni Rahim, SH

LP Ma'arif NU NTB; Peran, Tugas dan Fungsinya

Ada banyak institusi yang dibentuk NU sebagai perangkat kerjanya, baik yang memperkuat kerja-kerja pondok pesantren maupun kerja-kerja yang belum dijangkau oleh pondok pesantren. (Muktamar Nu XXXII: 2010) Lembaga dan badan otonom yang secara khusus dibentuk sebagai perangkat NU dalam membidangi aktivitas pendidikan secara luas (formal, non formal dan informal) sebagai media transformasi nilai-nilai yang diperjuangkan NU serta upaya untuk mewujudkan usaha yang dicita-citakan NU (Chairul Anam: 1985, 135) salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sebagai departementasi NU untuk mengurus kerja-kerja NU di bidang pendidikan dan pengajaran dan mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan yang bergabung dalam Jam'iyah Nahlatul Ulama.

Sebagai bentuk komitmen NU dalam memperluas kerja-kerja yang tak terjangkau pesantren secara sendiri-sendiri dalam bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya yang bersifat formal, antara lain dalam bidang reformasi sistem pendidikan dari pola tradisional menjadi pola modern, maka pada tahun 1938, PBNU melalui Komisi Perguruan NU (sebelum berubah nama menjadi LP Ma'arif NU) berhasil melahirkan *reglement* tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan di lingkungan lembaga pendidikan dibawah naungan NU, yaitu (1) *Madrasah Awaliyah* dengan lama belajar dua tahun (2) *Madrasah Ibtidaiyah* dengan lama belajar tiga tahun (3) *Madrasah Tsanawiyah* dengan lama belajar tiga tahun (4) *Madrasah Mu'allimin Wustha* dengan lama belajar dua tahun dan (5) *Madrasah Mu'allimin Ulya* dengan lama belajar tiga tahun. Kemudian pada tahun 1954, setelah perubahan nama dari Komisi Perguruan NU menjadi LP Ma'arif NU, terjadi perubahan mendasar tentang susunan sekolah atau madrasah NU sesuai perkembangan, baik yang bernaung dibawah Departemen (sekarang; Kementerian) Agama maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang; Kementerian Pendidikan Nasional). Demikian seterusnya, NU sebagai organisasi bersama para pimpinan lembaga pendidikan berfungsi sebagai motor penggerak reformasi kebijakan pendidikan di internal NU. Keterbukaan dan keluwesan sikap NU dalam menghadapi kondisi zaman, membuat NU senantiasa adaptif dengan beragam perubahan sosial yang terjadi. Hingga kini, NU telah mendorong perkembangan bentuk kelembagaan dan jenis satuan pendidikan yang dikembangkan baik oleh *Jam'iyah* NU (secara kelembagaan) maupun *Jama'ah* NU (warga NU) yang jumlahnya tersebar di seluruh pelosok dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari pendidikan formal, informal dan non formal. Yang formal meliputi Raudhlatul Atfal/ TK, Madrasah Ibtidaiyyah/ SD, Madrasah Tsanawiyah/ SLTP, Madrasah Aliyah/SMU/SMK, dan beberapa Perguruan Tinggi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institute dan Universitas NU.

Dengan adanya kebijakan untuk mengotonomikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan kepada

pimpinan pondok pesantren, yang *nota bene* mereka adalah pengurus NU disatu sisi, tetapi disisi lain sebagai warga NU yang menyelenggarakan pendidikan secara otonom. Dengan demikian tanpa menyebutkan atau menempelkan simbol atau lambang NU pada atribut pendidikan, maka sesungguhnya sudah dianggap otomatis milik NU, karena para tokoh/pimpinan pondok pesantren yang masuk menjadi pengurus NU langsung menjadi simbol dan lambang kedua institusi; NU dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU NTB sebagai salah satu departementasi yang vital di tubuh NU justru tidak menemukan eksistensinya di kalangan pengurus NU NTB yang sedang menjadi partai politik mandiri.

Dalam realitasnya, sekalipun seseorang aktif menjadi pengurus NU, baik syuriah maupun tanfidziah atau menjadi pengurus lembaga, badan otonom maupun lajnah dan bahkan tidak aktif di jajaran pengurus NU dalam struktur manapun, tetapi merasa menjadi anggota atau warga NU, maka konsentrasinya pada dunia pendidikan hampir sama. Bahkan bisa dikatakan, sebagian besar tokoh dan warga NU bergerak dalam bidang pendidikan baik formal, informal dan non formal. Agar fungsi NU sebagai payung besar dari semua aktivitas warga NU dalam bidang pendidikan, maka dibentuk departemen khusus dalam bentuk lembaga yang mengurus bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Selanjutnya LP Ma'arif NU merumuskan tiga visi besar yang menjadi *goal* bersama semua lembaga pendidikan Ma'arif NU, yaitu (1) mengembangkan sistem pendidikan dan terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan (*civilitize*), LP Ma'arif NU akan menjadi pusat pengembangan pendidikan bagi masyarakat, baik melalui sekolah, madrasah, perguruan tinggi, maupun pendidikan masyarakat. (2) Merepresentasikan perjuangan pendidikan NU yang meliputi seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. (3) Menciptakan komunitas institusional yang mampu menjadi *agent of educational reformation* dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan masyarakat beradab. Untuk mencapai visi ini, maka harus dibuktikan dengan tercapainya lima misi yang bersifat

operasional, yaitu (1) Menciptakan tradisi pendidikan melalui pemberdayaan manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal (2) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada masyarakat akar rumput (grass root), sehingga terjalin sinergi antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan (3) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kualitas tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang proporsional, dengan dukungan moral dan material. (4) Mengembangkan system informasi lembaga pendidikan sebagai wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media. (5) Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupun subyek-subyek yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam proses-proses pendidikan. (<http://www.maarif-nu.or.id/Profil.aspx>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2012)

Mengingat demikian strategisnya rencana yang ingin dicapai LP Ma'arif NU, maka diantara sekian banyak perangkat kerja NU, lembaga, lajnah dan badan otonom, khusus bidang pendidikan, LP Ma'arif NU diberikan tugas dan fungsi pokok sebagai penanggungjawab semua lembaga pendidikan yang bernaung dibawah NU sekaligus sebagai penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan yang didirikan langsung oleh LP Ma'arif NU sendiri. Di samping keistimewaan dari sisi tugas dan fungsinya, LP Ma'arif NU juga diperbolehkan membentuk strukturnya hingga level Majelis Wakil Cabang di Kecamatan dengan diberikannya tanggungjawab dan wewenang sesuai tingkatannya. Tugas pokok dan fungsi LP Ma'arif NU dalam kapasitasnya sebagai lembaga penanggungjawab pendidikan Ma'arif NU adalah (a) Menetapkan kebijakan operasional yang menghubungkan LP Ma'arif NU dengan lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, termasuk mengupayakan perlengkapan dana dari seluruh institusi

pendidikan dan donatur lainnya untuk mem-back up dana pengembangan pendidikan dalam sistem subsidi silang yang pengelolaannya dilakukan oleh penanggungjawab secara berjenjang

(b) Memperkuat sistem manajerial dan administarasi penyelenggaraan pendidikan menuju terwujudnya suatu lembaga pendidikan yang maju dan mandiri (c) Membuat pedoman tentang pengelolaan subsidi silang (d) Melakukan supervisi terhadap institusi pendidikan yang dikelola di bawah payung NU, baik yang didirikan oleh LP Ma'arif NU, lembaga, lajnah, banom, atau yayasan di lingkungan NU (e) Melakukan konsolidasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara maupun pengelola pendidikan NU (f) Mengembangkan sistem informasi lembaga pendidikan sebagai pusat komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media (g) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap masalah pendidikan dan pengembangannya. Termasuk dalam hal ini adalah mengoptimalkan peran masyarakat dalam bidang pendidikan (h) Bertanggungjawab kepada pengurus oragnisasi NU pada setiap tingkatan masing-masing atas pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah digariskan. (PP LP Ma'arif NU; 2006, 6-7)

Semua satuan pendidikan yang berafiliasi dibawah LP Ma'arif NU NTB tak ada satupun yang masuk ketegori didirikan, diselenggarakan dan dikelola oleh PW LP Ma'arif NU NTB melainkan dikelola langsung oleh pihak pengelola pendidikan Ma'arif NU dengan bertanggungjawab langsung kepada pihak penyelenggara pendidikan Ma'arif NU, yaitu lembaga khusus yang independen, otonum dan lokal berupa Yayasan dan atau Badan Hukum lainnya, sementara pihak penyelenggaran belum seluruhnya menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan Ma'arif NU yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada PW LP Ma'arif NU NTB sebagai pihak penanggungjawab pendidikan Ma'arif NU di NTB, pun demikian ke Pimpinan LP Ma'arif NU di masing-masing Cabang. Demikian pula dengan kebijakan LP Ma'arif NU yang mengatur tentang proses pendaftaran satuan

pendidikan ke dalam satuan pendidikan Ma'arif NU melalui pengajuan formal melalui pimpinan MWC LP Ma'arif NU atau langsung PC dan PW LP Ma'arif NU NTB belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan. Hal ini disebabkan oleh faktor kultur warga dan organisasi NU yang *ewoh-pakewuh* dengan posisi Tuan Guru/Syuriah yang demikian dominan.

Pelajaran *Ablussunah wal Jamaah*, misalnya, karena menjadi identitas pendidikan Ma'arif NU maka harus ditambahkan di dalam kurikulum semua satuan pendidikan Ma'arif NU dan dikembangkan secara integratif dalam semua kegiatan pendidikan baik intra kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler. Namun, PW LP Ma'arif NU NTB sebatas menyediakan dan mendistribusikan buku pelajaran ASWAJA untuk diterapkan di setiap satuan pendidikan, sedangak mengenai jam pelajarannya, kualitas guru, system evaluasi diserahkan kepada kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan Ma'arif NU di tingkat satuan pendidikan. Bahkan, buku ajar ASWAJA untuk jenjang ibtida'iyah, bisa jadi pada satuan pendidikan tertentu digunakan untuk jenjang SMK, (Wawancara, Ismail Ahmad: 2012, 25 September) dengan pertimbangan lokalitasnya. Demikian halnya dengan identitas ke-NU-an lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma'arif NU bahwa "setiap satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma'arif NU menggunakan nama Ma'arif atau NU". Sedangkan "satuan pendidikan Ma'arif NU lainnya bisa menggunakan nama lain tapi ditambahkan dengan atribut LP Ma'arif NU yang berdampingan dengan nama perhimpunan atau badan hukum penyelenggaranya baik pada papan nama, stempel, lambang, panji-panji, lencana, kop surat, kartu siswa, dan lain-lain. (Wawancara, Ismail Ahmad: 2012, 25 September)

Dengan demikian, sesungguhnya peran, tugas dan fungsi PW LP Ma'arif NU NTB terhadap lembaga pendidikan dan satuan pendidikan Ma'arif NU yang bernaung dibawahnya hanya sebatas koordinasi, fasilitasi, dan ruang sharing informasi dan pembelajaran dan belum bisa menjalankan fungsi intruktif, supervisi dan evaluasi secara kelembagaan penuh akibat belum

adanya lembaga pendidikan dan satuan pendidikan yang dibentuk, diselenggarakan dan dikelola langsung oleh PW LP Ma'arif NU NTB dan berbedanya karakter dan kader Ke-NU-an masing-masing pihak penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan Ma'arif NU, ada yang sangat terbuka dan *well come* dengan pihak LP Ma'arif NU dan bahkan dengan pihak lain sekalipun, tetapi ada juga yang sangat tertutup. Masing-masing lembaga dan satuan pendidikan Ma'arif NU yang bernaung pada LP Ma'arif NU NTB dibentuk, diselenggarakan dan dikelola langsung oleh warga NU melalui lembaga khusus, independen dan otonom baik hubungannya dengan pemerintah maupun dengan LP Ma'arif NU sendiri. Atau dengan kata lain, kebijakan LP Ma'arif NU NTB dalam bidang pendidikan adalah otonomi atau desentralisasi penuh dalam pemebntukana, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan beserta pembelajarannya. Bahkan pengajaran ke-aswaja-an di masing-masing satuan lembaga pendidikan Ma'arif NU di NTB juga bersifat otonom baik dari sisi materi, buku ajar, kualifikasi pengajar, metode pengajaran dan termasuk evaluasi proses pembelajarannya, sekalipun PW LP Ma'arif NU NTB telah berusaha menyiapkan dan mendistribusikan buku referensi dan standar kompetensinya.

Pola Hubungan Lembaga Pendidikan NU di NTB

Belum terpolanya hubungan kelembagaan pendidikan di lingkungan NU ini menimbulkan beberapa eksek, antara lain sulitnya pelaksanaan koordinasi, evaluasi maupun supervisi, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan NU sering terjadi kesimpangsiuran tanggungjawab, perebutan aset institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga lebih jauh berdampak pada kaburnya visi pendidikan NU. Oleh sebab itu, melalui Rakernas 2006 LP Ma'arif NU disepakati adanya pembahasan dan keputusan tentang pola komunikasi kelembagaan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi konsultatif, Koordinatif-Konsolidatif dan instruktif.

Tujuan ditetapkan pola komunikasi dan koordinasi ini adalah
(1) Terciptanya mekanisme pertanggungjawaban atas

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan nahdlatul ulama yang memungkinkan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan, baik penanggungjawab, penyelenggara maupun pengelola dapat mengembangkan kegiatan pendidikan yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama (2) Terciptanya Manajemen pendidikan ma'arif yang demokratis, efektif dan efisien menuju terwujudnya madrasah/seklah dan perguruan tinggi yang maju, unggul dan mandiri (3) Terpetakannya potensi kependidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terjalin dalam hubungan yang demokratis, adil dan bertanggungjawab (4) Terjalannya hubungan kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap masalah pendidikan Nahdlatul Ulama, termasuk instansi pemerintah, LSM dan masyarakat luas. (PP. LP Ma'arif NU: 2006, 19)

Dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram pada tahun 1973 yang diprakarsai oleh Pengurus NU NTB dan Cabang Lombok Barat dan yang personalia pengurnya yang diaktekan mengatasnamakan pribadi-pribadi (oknum) yang sedang menjadi sebagai ketua tanfidziah dan rais Syuriah PCNU Lombok Barat dan atau Pengurus Wilayah NU NTB, maka sesungguhnya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan yang dididrikan langsung oleh NU/Ma'arif NU NTB dan seharusnya semua satuan pendidikan yang dinaunginya diselenggarakan, dikelola dan dipertanggungjawabkan langsung oleh LP Ma'arif NU kepada Organisasi NU sebagai penanggungjawabnya. Karena kabijakan demikian baru ditetapkan setelah era reformasi, maka sangat wajar, kalau pada awalnya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan secara otonom dimana pertanggungjawabannya kepada NU sebagai penanggungjawab dimaknai dalam bentuk pertanggungjawaban pengelola satuan pendidikan Ma'arif NU hanya kepada pihak Yayasan yang pengurnya masih direfresentasikan oleh pengurus NU saat itu.

Kebijakan yang mengatur pola hubungan dan komunikasi antar kelembagaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

Ma'arif NU demikian rigid, namun disisi lain, dalam hal pengelolaan satuan pendidikan diberikan otonomi seluas-luasnya pada pihak penyelenggaraan dan pihak pengelola dalam menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan NU, maka terjadi problematic pada tataran implemetasi, yakni kembali pada kesadaran individu maupun kolektif sebagai jama'ah NU. Apabila pihak penyelenggara dan pengelola berkesadaran tinggi yang diwujudkan dalam bentuk sikap terbuka pada pihak lain dan termasuk terhadap perubahan sosial lainnya, maka PW LP Ma'arif NU NTB akan menemukan eksistensinya untuk merumsuakn kebijakan pendidikan lalu diintsruksikan kepada pihak penyelenggara dan pengelola guna dijalankan, lalu I, melakukan proses pembinaan, fasilitasi, mediasi, supervise dan evaluasi pelaksanaannya bahkan bila perlu mengeluarkan akreditasi lembaga dana satuan pendidikan NU berdasarkan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh NU sendiri. Namun, bila sebaliknya, pihak penyelenggara dan pengelola satuan NU adalah kalangan pengurus NU, tokoh cultural NU atau keturunan tokoh kharismatik NU, namun sikapnya tertutup dengan pihak laur dan termasuk dengan NU atau LP Ma'arif NU, maka logo NU tinggal tetap menempel pada satuan pendidikan tertentu, namun eksistensi LP Ma'arif NU dengan segenap mandate, visi dan misinya terhadap kemajuan pendidikan NU tidak dapat menjiwainya.

Akhirnya, kebijakan desentralisasi penuh dalam pendidikan NU, disatu sisi menjadi penyebab berdirinya lembaga dan satuan pendidikan NU yang jumlahnya secara nasional mencapai kurang lebih 6000 lembaga pendidikan, atau di Lombok sebanyak 528 satuan pendidikan dengan beragam cara, pola dan strategi yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh berdsarkan konteksnya sendiri-sendiri, namun disisi lain berdampak pada kualitas lembaga dan satuan pendidikan Ma'arif NU di NTB sangat beragam dengan rata-rata dibawah Standart Pendidikan Minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Dalam kondisi demikian, LP Ma'arif NU NTB sebagai penanggungjawab bidang pendidikan hanya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi akses informasi

bantuan/sumbangan, namun belum masuk pada wilayah fungsi instruksi kebijakan yang kemudian implementasinya disupervisi dan dievaluasi. Namun, terakhir dengan adanya system akreditasi kelembagaan pendidikan, maka PW LP Ma'arif NU NTB sedikit menemukan eksistensinya, karena para pihak penyelenggara dan pengelola pendidikan NU membutuhkan akreditasi yang baik, sementara PW LP Ma'arif NU memiliki banyak sumberdaya manusia yang berkapasitas untuk bidang akreditasi baik fasilitasi lapangannya maupun akses informasi dan komunikasi ke pihak penentunya. Logo NU atau Ma'arif NU hanya sebatas identitas sebagai komunitas yang bertradisi NU dan karenanya hanya sebatas hubungan emosional, namun belum mampu menjadi ikatan ideologis-struktural. Tetapi, akan kah NU melalui PW LP Ma'arif NU mengambil kebijakan re-sentralisasi kelembagaana dan manajemen pendidikan Ma'arif NU sebagai solusinya? *Wallahu a'lam bi al-shawab*

Catatan Akhir

Fakta historis ini terus menjadi budaya yang tumbuh dan terpeliharakan di kalangan NU sehingga mewujud menjadi tiga hal. *Pertama*, Sikap warga NU yang senantiasa memiliki giroh untuk mengabdikan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan lembaga dan satuan pendidikan, *Kedua*, Afiliasi kelembagaan pendidikan di NTB ke naungan Pendidikan Ma'arif NU beralaskan faktor historis dan keturunan atau hubungan guru-murid. *Ketiga*, Tradisi otonom dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga dan satuan pendidikannya. Peran, fungsi dan tugas PW LP Ma'arif NU NTB dalam mengelola 528 Satuan Pendidikan yang berafiliasi dengan Pendidikan Ma'arif NU NTB tidak bisa maksimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU, melainkan sebatas memberikan motivasi pengembangan kualitas kelembagaan dan proses pembelajaran, mengkoordinasikan program-program pemerintah dan donor dan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif NU.

Daftar Pustakan

- Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV (Jember: Masjid Sunan Kalijaga, 2006,)
- Aceng Abdul Azis DY, *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan*, dalam LP. Ma'arif NU Pusat, *NU: Dari Ulama untuk Indonesia* (Jakarta, 2003)
- Agus Salim, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jepara: INISNU, 2003)
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 27 tertanggal 9 September 1987
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 28 tertanggal 19 Desember 2000
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 16 tertanggal 17 Januari 2007
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram No. 35 tertanggal 28 Agustus 1973.
- Andree Feillard, *NU, Vis-à-vis Negara. Pencarian Visi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta, LkiS, 1999).
- Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya, PT. Duta Aksara Mulia, Cetakan III, 2010
- Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Erwin Padli, Urgensi Sejarah al-Qur'an dalam Pendidikan Islam, *eL-HIKMAH: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam*, Volume 14, No. 2, 159-170
- H.M. Anawar, *Sejarah Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram*, Mataram (Dokumen pribadi yang tidak dipublikasikan), 1973, hal. 3.
- H.M. Anwar, *Sepintas Kilas Tentang Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok; sebuah Catatan dari H.M. Anwar selaku sekretaris PWNU NTB*, (dokumen pribadi, tidak dipublikasikan), Monjok, 1990
- <http://www.maarif-nu.or.id/Profil.aspx>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2012
- Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)*, Mataram, Pustaka Lombok, 2010, hlm. 62-63
- Keputusan Mukhtar XXVII NU NO 02/MNU-27/1984 tentang *Naskah Khittah NU 1926*

- Kumpulan Materi dari Konfrensi ke Konfrensi 1996-2012, (Dokumen di Sekretariat PWNU NTB, 2012)
- Kumpulan SK-SK Pengurus Cabang dan PWNU NTB dari tahun 1984-2012, (Dokumen di Sekretariat PWNU NTB, 2012)
- Laporan Pertanggungjawaban PWNU NTB periode 1996-2002, 2002-2007 dan 2007-2012, Dokumen di Sekretariat PWNU NTB, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 2002)
- Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LkiS,1994)
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, Cet. II, 1995
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Panitia Mukhtar NU Ke 32, *Laporan Pertanggungjawaban PBNU periode 2004-2010, Makassar, 2010*
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU*, Jakarta, PP LP Ma'arif, 2006
- Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma'arif NU*, Jakarta, PP LP Ma'arif, 2006, hlm. 30
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU Hasil Mukhtar XXXII di Makassar*, Jakarta, LTN-PBNU, 2011.
- PP LP Ma'arif NU; *Materi Rapat Kerja Nasional 2006* LP Ma'arif NU, Jakarta, PP Al-Ma'arif NU 2006)
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Penatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sanafiah Faesal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.